

# Peran UNESCO Dalam Pemberantasan Buta Aksara Di Indonesia Tahun 2007-2012

Oleh :

**Ade Sahputra**

([adhesahputra@yahoo.com](mailto:adhesahputra@yahoo.com))

**Pembimbing: Pazli, S.IP,M.Si**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl.H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-Telp/Fax.  
0761-63277

## *Abstract*

*This research describes the role of UNESCO in eradication of illiteracy in Indonesia, 2007-2012 (Case Study: Papua) Illiteracy is a problem that occurs in almost every country in the world. Illiteracy is also strongly related to poverty, backwardness and helplessness. In 2005, the illiterate population in Indonesia is still around 18.4 million people, which means a state with the 8th largest illiterate population in the world. The high level of illiteracy in Indonesia are caused by five main causes, namely the elementary school dropout , weighing geographical condition of Indonesia, the emergence of new illiterate, the influence of sociological factors, as well as the return of a person becoming illiterate sufferers.*

*The research method used is a descriptive of qualitative research method about the facts. This research is an explanatory that describe about problem, indication, policies, and actions. In writing techniques, the author's collect and collate data through library research from several sources like books, journals, articles, websites, the media and others. The author's also use the concept of a role in view the case in this study.*

*This research shows the role that UNESCO works in Indonesia has shown its role in providing assistance and programs in an effort to accelerate the eradication of illiteracy. programs include education for all and Literacy initiative for empowerment. UNESCO worked intensely to stop the growth of new literacy and support their liberation from illiteracy. UNESCO is involved with all parties in order to protect the public in educational attainment in Indonesia.*

**Keywords: Illiteracy, Role, UNESCO, Education For All (EFA)**

## **Pendahuluan**

Tulisan ini akan membahas tentang peran UNESCO (*united nations educational, scientific, and cultural Organiastion*) dalam pemberantasan buta aksara (*Illiterate*) di Indonesia. Buta aksara adalah ketidak kemampuan untuk membaca, menulis dan berhitung untuk fungsi efektif dan pengembangan individu

dalam masyarakat. Menurut definisi UNESCO adalah :

*literacy is the ability to use reading, writing and numeracy skills for effective functioning and development of the individual and the community. Literacy is according to the UNESCO definition : A person is literate who can, with*

*understanding, both read and write a short statement on his or her everyday life.*<sup>1</sup>

Berdasarkan data *Education for All Global Monitoring Report* tahun 2005, populasi buta huruf di Indonesia masih berkisar 18,4 juta orang yang berarti merupakan negara yang ke-8 dengan populasi buta huruf terbesar di dunia. Dengan program dan gerakan yang terencana dan terpadu, Pemerintah bersama semua unsur masyarakat diharapkan dapat bekerja sama melaksanakan gerakan pemberantasan buta aksara sehingga tuntas dalam beberapa tahun yang akan datang. Pada tahun 2004, 64% dari total buta aksara (15.414.878 orang) adalah perempuan yang mewakili dua pertiga penduduk yang buta huruf di Indonesia.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa 10,2% dari populasi orang dewasa buta huruf dan kesenjangan gender adalah 7,3. Selain itu, ada lebih dari 200.000 drop-out dari sekolah dasar.

Pemerintah Indonesia membahas solusi untuk masalah ini dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang "Program Gerakan Nasional Wajib Sembilan Tahun Pendidikan Dasar dan Melawan Buta Aksara." Setelah Instruksi Presiden ini, pada tahun 2006, Direktorat Pendidikan Masyarakat mengembangkan program akselerasi keaksaraan sebagai Gerakan Nasional dan program ini telah menghasilkan pencapaian 8.07% dari buta aksara.<sup>3</sup>

Tingginya tingkat buta aksara di Indonesia disebabkan oleh lima penyebab utama, yakni tingginya angka putus

Sekolah Dasar (SD), beratnya kondisi geografis Indonesia, munculnya penyandang buta aksara baru, pengaruh faktor sosiologis masyarakat, serta kembalinya seseorang menjadi penderita buta aksara. Pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu dari tujuan nasional. UNDP menetapkan kemajuan suatu negara dapat ditentukan oleh tiga indikator indeks pembangunan manusia, yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks perekonomian. Angka melek aksara adalah salah satu variabel dari indikator indeks pendidikan. Berdasarkan data BPS (2006), angka buta aksara penduduk Indonesia mencapai 12,8 juta orang atau 0,05 persen dari total jumlah penduduk, dan angka tersebut meningkat pada kelompok umur dewasa (15 tahun keatas) menjadi 8,4 persen dari total penduduk pada kelompok umur tersebut. Perempuan menempati posisi lebih tinggi pada angka kebutaaksaraan kelompok usia 15-44 tahun, dengan persentase sebesar 4,8 persen untuk perempuan, dan 2,9 persen untuk laki-laki. Hal ini merupakan indikasi dari adanya kesenjangan gender dalam kemelekaksaraan. Pada kelompok usia 60 tahun ke atas, persentase tersebut menjadi lebih tinggi hingga 16,36 persen. Tercatat oleh BPS terjadi penurunan buta aksara tiap tahunnya, namun angka buta aksara perempuan tetap tinggi daripada angka pada laki-laki, khususnya pada kelompok usia tua. Provinsi dengan jumlah buta huruf yang tinggi dan tingginya angka kemiskinan, yaitu Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Utara, Jawa Timur dan Sulawesi Barat.<sup>4</sup>

UNESCO adalah salah satu organisasi internasional yang bergerak dalam bidang pendidikan. Sebagai salah satu anggota UNESCO, Indonesia memberi perhatian yang sangat besar terhadap upaya pengentasan ketunaaksaraan. Namun demikian angka

---

<sup>1</sup> Education For All Global monitoring Report. *Literacy for life*. UNESCO. 2006 hal.158

<sup>2</sup> UNESCO, [The Plurality of Literacy and its implications for Policies and Programmes](#) (France: the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2004), hal.13

<sup>3</sup> *Literacy: Empowerment, Development and Peace*. Ministry of Education and Culture Of Indonesian. 2012. hal. 2

---

<sup>4</sup> *Ibid* hal. 3-4

tunaakstra masih relatif tinggi sebagai akibat dari tingginya angka putus sekolah kelas 1, 2 dan 3 sekolah dasar yang disinyalir potensial menjadi tunaakstra baru, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta kondisi geografis yang luas. Menurut data BPS tahun 2011, sasaran pendidikan keaksaraan berjumlah 6.730.682 orang dari kelompok umur 15–59 tahun dengan jumlah perempuan sebanyak 4.465.282 orang dan laki-laki 2.265.399 orang.<sup>5</sup>

Untuk memacu percepatan pengentasan ketunaakstraan, pemerintah setiap tahun memberikan anugerah aksara dan penghargaan aksara kepada kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang telah berhasil dalam menyukseskan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Buta Aksara (GNP-PBA). Anugerah Aksara dan Penghargaan Aksara ini diberikan pada puncak peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) sebagai bentuk dukungan bagi daerah-daerah dalam upaya menyukseskan pengentasan ketunaakstraan.

Selain itu, untuk mempercepat program pemberantasan buta aksara di Indonesia diperlukan peran organisasi atau lembaga internasional yang memiliki fokus perhatian dalam masalah buta aksara itu sendiri, yaitu UNESCO yang merupakan organisasi internasional dalam bidang pendidikan, sosial dan budaya.

Dalam upaya pemberantasan buta aksara itu sendiri, UNESCO berperan dalam pemberian bantuan luar negeri dalam bentuk bantuan teknis, kampanye melawan buta aksara. Dalam menjalankan peran nya UNESCO bekerja sama dengan pemerintah Republik Indonesia serta organisasi non pemerintah lainnya.

## Landasan Teori

Dalam sebuah tulisan ilmiah dibutuhkan suatu kerangka teori beserta konsep dan teori yang jelas. Konsep dan teori yang digunakan pun harus relevan dengan penelitian yang dilakukan. Perspektif yang digunakan adalah pluralisme, dengan tingkat analisa kelompok, konsep yang digunakan adalah *intergovernmental organizations*, sedangkan teori yang digunakan adalah organisasi internasional.

Pluralisme adalah sebuah perspektif yang terdapat dalam hubungan internasional dan berkembang dengan pesat. Pluralisme beranggapan bahwa hubungan internasional tidak hanya sebatas pada negara saja, tetapi juga hubungan antar individu dan kelompok yang negara tidak selalu menjadi aktor utama.<sup>6</sup> Organisasi internasional juga bisa berperan penting.

Pluralis berpendapat bahwa aktor yang memiliki peranan penting di dalam politik internasional adalah aktor non negara seperti organisasi internasional (pemerintah atau non pemerintah), aktor-aktor lain selain negara juga memiliki peranan yang penting dan negara bukan aktor tunggal, dalam pembuatan kebijakan luar negeri sering terjadi konflik, kompromi dan kompetisi antar aktor di dalam negara sehingga negara bukan merupakan aktor yang rasional, masalah-masalah yang terjadi sekarang sudah meluas pada masalah ekonomi dan sosial tidak hanya masalah-masalah kekuasaan dan keamanan nasional.

*Intergovernmental organizations* (IGO) atau organisasi antar pemerintah merupakan sebuah organisasi internasional

---

<sup>5</sup> *ibid*, hal.20

---

<sup>6</sup> Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochmad Yani, 2006. *Pengantar Hubungan Internasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm 26

yang anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara.<sup>7</sup> IGO memiliki tujuan untuk menciptakan mekanisme untuk dunia agar bekerjasama di bidang keamanan dan perdamaian, juga menangani masalah di bidang ekonomi dan sosial.

### Kondisi Buta Aksara di Indonesia

Pembangunan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), dimana adanya pembangunan ekonomi akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dan juga sebaliknya, pertumbuhan ekonomi akan dapat memperlancar proses pembangunan ekonomi. Dalam berbagai literatur ilmu ekonomi disebutkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, walaupun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi. Faktor ekonomi yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Sedangkan faktor non ekonomi antara lain mencakup situasi politik, sosial budaya, serta sistem yang berkembang dan berlaku pada masyarakat.<sup>8</sup>

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini jika dilihat lebih dalam lagi, yaitu menurut provinsi-provinsi di Indonesia akan menunjukkan angka yang cukup beragam. Berdasarkan hasil penghitungan BPS pada tahun 2009, IPM tertinggi ditempati oleh DKI Jakarta dengan angka sebesar 77,36. Sedangkan IPM terendah (ranking 33) ditempati oleh Provinsi Papua dengan angka capaian

sebesar 64,53.<sup>9</sup> Dari angka tersebut terlihat bahwa pembangunan manusia di Provinsi Papua masih tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Bahkan masih lebih rendah juga jika dibandingkan dengan wilayah yang merupakan pecahan dari Provinsi Papua itu sendiri, yaitu Papua Barat yang menempati ranking 30 dengan capaian angka sebesar 68,58.<sup>10</sup>

Di Provinsi Papua, tingkat melek huruf di kabupaten bervariasi, dari 97,48 persen di Kabupaten Biak Numfor, hingga 30,52 persen di Kabupaten Nduga. Presentase tingkat putus sekolah di level SMP untuk tahun akademis 2008/2009 adalah 4.2 persen.<sup>11</sup> Di beberapa desa, orang tua menyatakan bahwa, hampir semua anak telah putus sekolah. Kasus pekerja anak di Provinsi Papua adalah yang tertinggi kedua di Indonesia, menurut Survei Rumah Tangga Sangat Miskin tahun 2008 (RTSM) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). 130.000 pekerja anak ditemukan berada di Papua (75.000 laki-laki dan 55.000 perempuan) di mana 80.000 diantaranya berusia antara dan kurang dari 15 tahun.<sup>12</sup>

Jika dilihat dari aspek-aspek yang menjadi tujuan dari pembangunan manusia, aspek pendidikan merupakan

<sup>9</sup> *Human Development Report 2011* dalam <http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2011> diakses tanggal 20 april 2014

<sup>10</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Laporan Perkembangan Pencapaian Millennium Development Goals Indonesia 2007*, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta. 2007 Hal. 18

<sup>11</sup> Ratman, Dadang Rizki. 2011. *Persentase Pemuda yang Buta Aksara Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Tipe Daerah* (2009). <http://kppo.bappenas.go.id/preview/236>. Diakses pada tanggal 01 juli 2014.

<sup>12</sup> Kementerian Pendidikan Nasional. "Statistik Pendidikan Nasional 2008/2009". 2009 Hal. 30

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 93

<sup>8</sup> Bannock. G, Baxter. R. E, Davis. E. *Dictionary of Economics*. Bloomberg Press, Princeton N. J. 2003

salah satu masalah yang cukup serius yang harus mendapatkan perhatian khusus di Pulau Papua. Berdasarkan Perda nomor 5 Tahun 2006, besarnya alokasi dana otonomi khusus (otsus) untuk sektor pendidikan ditetapkan sebesar 30%. Sehingga dari besarnya persentase tersebut dapat terlihat bahwa masalah pendidikan merupakan masalah yang cukup serius dan harus segera ditangani. Secara empiris berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2009, besarnya angka melek huruf untuk Provinsi Papua 75,58% dan Provinsi Papua Barat 92,34%, serta rata-rata lama sekolah untuk Provinsi Papua mencapai 6,57 tahun (BPS Prov. Papua, 2010) dan Provinsi Papua Barat mencapai 8,01 tahun (BPS Prov. Papua Barat, 2010).<sup>13</sup>

### **Pemberantasan Buta aksara oleh UNESCO di Indonesia (Papua)**

UNESCO telah sekian lama aktif dalam pergerakan untuk mempromosikan Pendidikan untuk Semua ( *Education for All* ). Pada konferensi dunia tentang Pendidikan untuk Semua di Jomtien, Thailand, 1990, para peserta menyepakati pencapaian tujuan pendidikan dasar bagi semua anak dan orang dewasa pada tahun 2000. Konferensi Jomtien bukan satu-satunya peristiwa untuk itu, melainkan juga merupakan titik awal dari pergerakan yang kuat. UNESCO, UNICEF, Bank Dunia, UNDP menyelenggarakan forum pendidikan dunia untuk mengevaluasi situasi dan memperkuat komitmen terhadap Pendidikan untuk Semua. Sepuluh tahun kemudian sebanyak lebih dari 1100 peserta dari 164 negara berkumpul di Dakar, Senegal, untuk menghadiri Forum Pendidikan Dunia<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> *Ibid*, Hal 32

<sup>14</sup> Monica dalen. "Kata pengantar" [http://www.idp-europe.org/docs/uio\\_upi\\_inclusion\\_book/3Kata\\_Pengantar.pdf](http://www.idp-europe.org/docs/uio_upi_inclusion_book/3Kata_Pengantar.pdf) diakses pada tanggal 28 april 2014

UNESCO dipercaya untuk memimpin upaya-upaya guna menindaklanjuti Kerangka Aksi Dakar. Pendidikan inklusif ditetapkan dalam Konferensi Dunia Salamanca sebagai satu prinsip dalam memenuhi kebutuhan belajar kelompok-kelompok yang kurang beruntung, terpinggirkan, dan terkucilkan. Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi mengamanatkan kepada UNESCO untuk memastikan bahwa pendidikan kebutuhan khusus merupakan bagian dari setiap diskusi yang terkait dengan pendidikan untuk semua.

### **Peran Asistensi Unesco Dalam Pelayanan Informasi**

Didalam negeri, upaya dalam bentuk pengurangan jumlah muncul nya korban buta aksara baru menjadi tanggung jawab sektor-sektor yang menjadi tugas dan fungsinya. Dengan asistensi dari UNESCO pada tahun 2007, dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, diperkirakan akan terlaksana kebijakan di bidang kesehatan, khususnya melalui revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI); di bidang pendidikan melalui percepatan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP); di bidang ekonomi melalui Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) dan Model Desa Prima; serta perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan masalah kekerasan perempuan lainnya di 17 provinsi dan 50 kabupaten/kota. Pada tahun 2007 diharapkan dapat tersusun Rencana Aksi Nasional Pengarusutamaan Gender (RAN-PUG) dan disahkannya Undang-Undang tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) dan Peraturan Pemerintah tentang PTPPO.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> *Children: education and trafficking*” dalam [http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/ma/inside/published\\_docs/Final-LM-Report-Bahasa-Indonesia.pdf](http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/ma/inside/published_docs/Final-LM-Report-Bahasa-Indonesia.pdf)

Dalam hubungan ini, UNESCO meluncurkan proyek review (peninjauan ulang) kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini dari UNESCO – OECD sebagai bagian dari perencanaan 2004 – 2009. Tujuannya adalah untuk menyediakan negara-negara yang terpilih mendapat kesempatan untuk mereview kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini mereka dan mengidentifikasi pilihan-pilihan dan strategi yang nyata untuk perbaikan. Adapun 4 negara yang dipilih berdasarkan keinginan yang diusulkan mereka yaitu: Brazil, Indonesia, Kazakhstan dan Kenya.<sup>16</sup> Review yang ada sekarang dilakukan sebagai bagian dari partisipasi Indonesia dalam proyek ini, yang diselenggarakan bekerjasama dengan UNESCO dan OECD.

Dengan adanya kebijakan dan review dari UNESCO terhadap PAUD Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan di tahun-tahun terakhir ini. Diantaranya keputusan Direktorat untuk mengefektifkan pelayanan lapisan bawah dan menyatukan pelayanan untuk ibu-ibu dengan pelayanan anak usia dini wajar menerima penghargaan khusus. Ini telah memungkinkan banyak anak usia dini di Indonesia mendapat akses pelayanan pendidikan dan perawatan dasar untuk memastikan perkembangan kesehatan mereka.

### **Peran Asistensi UNESCO dalam upaya Pencapaian Pendidikan Untuk Semua (PUS)**

adalah hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh

---

<sup>16</sup> <sup>16</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional Indonesia “*Laporan Review Kebijakan: Pendidikan dan Perawatan Anak Usia Dini*” Jakarta.2006. hal.12

pemerintah. Sebagai perwujudan komitmen dalam memberikan kesempatan memperoleh pendidikan, pada tahun 1994 pemerintah Indonesia mencanangkan wajib belajar pendidikan dasar bagi anak-anak usia 7-15 tahun, yang mencakup pendidikan pada tingkat SD/MI dan tingkat SMP/MTs.

UNESCO adalah organisasi yang berperan penting dalam menanggulangi dalam upaya percepatan pemberantasan buta aksara. dalam hal ini UNESCO memainkan perannya sebagai fungsi pembuat aturan. Dengan Asistensi Ini Pada Tahun 2006 Indonesia Telah Mengundang Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA) yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan GNP-PWB/PBA dan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (*LIFE*) UNESCO-UNLD.<sup>17</sup>

Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal menyediakan layanan program pendidikan keaksaraan baik keaksaraan dasar yang merupakan program pemberantasan buta aksara maupun

---

<sup>17</sup> PBB. United Nations Literacy Decade: Education for All ; International Plan of Action Implementation of General Assembly Resolution 56/116. New York: 2002,

keaksaraan usaha mandiri atau menu ragam keaksaraan lainnya yang merupakan program pemeliharaan dan peningkatan kemampuan keaksaraan. Hal ini dilakukan karena terdapat kecenderungan para aksarawan baru atau penduduk dewasa berkeaksaraan rendah lainnya kembali buta aksara apabila kemampuan keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan.

Atas kebijakan dan aturan itu, sasaran MDGs untuk rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki di Indonesia pada kelompok umur 15-24 tahun juga telah tercapai. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki di tingkat nasional mencapai 99,95 pada tahun 2011. Keragaman IPG melek huruf antarprovinsi berkisar antara 86,88 (Papua) sampai 101,15 (Nusa Tenggara Timur). Keberhasilan pencapaian sasaran di bidang ini ditunjang oleh pemilihan strategi penghapusan buta aksara yang tepat, yaitu pendidikan keaksaraan fungsional. Melalui pendidikan keaksaraan fungsional, warga diajarkan kemampuan keaksaraan yang berfungsi untuk menunjang kehidupannya sehari-hari.

**Membentuk Program CLCC (*Creating Learning Communities for Children*) Dalam konteks Departemen Pendidikan Nasional disebut sebagai SBM (*School-Based Management*) atau MBS (*Manajemen Berbasis Sekolah*).**

Tujuan program ini adalah memberikan kontribusi bagi perbaikan kualitas Pendidikan Dasar di Indonesia. Program ini bermaksud untuk mengembangkan dan mendesiminasikan sebuah model yang sesuai dan dapat direplikasi dalam rangka perbaikan kualitas pembelajaran anak-anak Sekolah Dasar di Indonesia dan khususnya di Papua melalui penerapan 3 pilar/komponen program ini yaitu Manajemen Sekolah, PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan

Menyenangkan), dan PSM (Peran Serta Masyarakat).<sup>18</sup>

Seiring dengan keluarnya Undang-Undang Otonomi Daerah, maka bidang pendidikan pun berubah dari pola sentralisasi kepada desentralisasi dimana penanganan kebijakan pendidikan diserahkan lebih banyak kepada sekolah sebagai institusi pendidikan terendah yang lebih mengetahui situasi sekolahnya sendiri untuk mengembangkan sekolah dengan menghimpun dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada di sekelilingnya. Program ini telah di jalan di Jayapura, Jayawijaya, Biak Numfor.

Salah satu contoh dari program ini adalah program pembelajaran kelas rangkap. Rendahnya tingkat pendaftaran siswa di pedesaan dan kekurangan guru merupakan dua masalah utama sehingga anak-anak ditolak masuk sekolah. Pada sebagian besar kasus, hasilnya menyedihkan karena anak-anak tidak dapat masuk sekolah pada umur yang ditentukan. Sementara beberapa anak mungkin akan tetap masuk, beberapa anak yang lain menyerah karena mereka tidak merasa nyaman berada bersama anak-anak yang lebih muda.

Pembelajaran kelas rangkap juga mendorong penggunaan bahasa lokal seperti ditetapkan dalam reformasi pendidikan. Mengelompokkan anak-anak ke dalam kelompok bahasa mendorong mereka untuk berkomunikasi dan memahami kondisi belajarnya di lingkungan yang ramah. Anak-anak juga didorong untuk belajar sendiri dan tidak tergantung pada guru setiap saat.

Salah satu alasan UNESCO untuk menerapkan pembelajaran kelas rangkap di Papua adalah Lokasi pembelajaran yang

---

<sup>18</sup> *Harmonisasi Program Pembangunan Manusia Dan Bantuan Donor Di Papua* dalam [http://www.undp.or.id/papua/docs/Booklet%20Donor%20Coordination%20June%202006%20\\_LIP%201-54\\_.pdf](http://www.undp.or.id/papua/docs/Booklet%20Donor%20Coordination%20June%202006%20_LIP%201-54_.pdf) diakses pada tanggal 05 juli 2014

sulit dijangkau, terbatasnya sarana transportasi, dan pemukiman penduduk yang jaraknya berjauhan, serta adanya ragam mata pencaharian penduduk misalnya berladang, mencari ikan bahkan menebang kayu atau mencari sesuatu di hutan, maka hal ini dapat mendorong penggunaan pembelajaran kelas rangkap. SD Persiapan Penuai merupakan sekolah yang didirikan oleh Yayasan Penuai Manokwari sejak tahun 2006. Berdirinya sekolah ini mampu mengatasi permasalahan masyarakat sekitar untuk memperoleh akses pendidikan. Sebelumnya banyak anak yang tidak bersekolah karena faktor geografis yaitu letak sekolah yang jauh dari tempat tinggal masyarakat Amban. Sekolah ini dibangun dengan model Kelas Rangkap karena faktor minimnya tenaga guru, letak geografis yang sulit dijangkau, jumlah siswa relatif kecil, dan terbatasnya ruangan kelas. Dalam menjalankan program ini UNESCO memberikan bantuan dana kepada pemerintah Papua sejumlah ± 3 juta dan ± 2,8 juta USD dari USAID.<sup>19</sup>

### **Program percepatan pemberantasan buta aksara melalui program Literacy initiative for empowerment (LIFE)**

*The Literacy Initiative for Empowerment (LIFE)* dilahirkan sebagai suatu selama sepuluh tahun (2006-2015) kerangka strategis melalui mana pemerintah nasional, LSM, masyarakat sipil, sektor swasta, badan-badan PBB, dan badan-badan bilateral dan multilateral kolektif mempercepat upaya melek huruf di 35 negara-negara di mana buta huruf merupakan tantangan kritis.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> *Honor and harmonization Literacy for Children* dalam

[http://www.undp.or.id/papua/docs/Booklet%20Donor%20Harmonization%20Papua\\_Bahasa/Bagian%203%20Pendidikan.%20Ekonom%20Lokal.%20Gender.pdf](http://www.undp.or.id/papua/docs/Booklet%20Donor%20Harmonization%20Papua_Bahasa/Bagian%203%20Pendidikan.%20Ekonom%20Lokal.%20Gender.pdf) diakses pada tanggal 28 juni 2014.

<sup>20</sup> *Literacy Initiative for Empowerment* dalam <http://uil.unesco.org/home/programme-areas/literacy-and-basic-skills/life-literacy->

Sejalan dengan program LIFE, dibangunlah dalam kerangka kerja AKRAB (Aksara agar Berdaya) pada tahun 2009 sebagai upaya penuntasan buta aksara melalui pendidikan keaksaraan terintegrasi dengan kecakapan hidup yang diharapkan nantinya dapat mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di negeri ini.

Demi tercapainya Program Rintisan Aksara Kewirausahaan ini, Kemdiknas telah menunjuk 100 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk melaksanakan program keaksaraan melalui kewirausahaan atau lebih simpel lagi dengan sebutan Aksara Kewirausahaan. Bantuan program rintisan ini sebanyak Rp 70 juta per lembaga. Nantinya bantuan ini memang selayaknya dikelola dan dipergunakan dengan sebaik dan sebenar-benarnya sesuai kebutuhan program yang diselenggarakan bagi masyarakat sesuai dengan target sasaran.

Keberhasilan pemerintah Indonesia dalam memberantas buta aksara memperoleh penghargaan dari UNESCO pada tahun 2012, yakni King Sejong Literacy Prize. Prestasi internasional ini merupakan cermin keberhasilan program pendidikan keaksaraan yang diintegrasikan dengan pengenalan kewirausahaan.

### **KESIMPULAN**

Buta aksara adalah ketidakmampuan untuk membaca, menulis dan berhitung untuk fungsi efektif dan pengembangan individu dan masyarakat. Buta aksara adalah masalah yang terjadi hampir di semua negara di dunia. Buta aksara juga sangat berkaitan dengan kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Atas dasar itu,

[initiative-for-empowerment/news-target/literacy-initiative-for-empowerment-life/c0944fef584a58d27d1a9bef08dd0a51/](http://www.unesco.org/life/initiative-for-empowerment/news-target/literacy-initiative-for-empowerment-life/c0944fef584a58d27d1a9bef08dd0a51/) diakses tanggal 05 juli 2014

konferensi para Menteri Pendidikan Sedunia di Teheran tanggal 8-9 September 1965, mengusulkan kepada UNESCO agar semua negara anggota PBB segera memulai upaya pengentasan buta aksara secara internasional. Pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu dari tujuan nasional. UNDP menetapkan kemajuan suatu negara dapat ditentukan oleh tiga indikator indeks pembangunan manusia, yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks perekonomian. Angka melek aksara adalah salah satu variabel dari indikator indeks pendidikan.

Di Provinsi Papua, tingkat melek huruf di kabupaten bervariasi, dari 97,48 persen di Kabupaten Biak Numfor, hingga 30,52 persen di Kabupaten Nduga. Presentase tingkat putus sekolah di level SMP untuk tahun akademis 2008/2009 adalah 4.2 persen. Di beberapa desa, hampir semua anak telah putus sekolah. Kasus pekerja anak di Provinsi Papua adalah yang tertinggi kedua di Indonesia, menurut Survei Rumah Tangga Sangat Miskin tahun 2008 (RTSM) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). 130.000 pekerja anak ditemukan berada di Papua (75.000 laki-laki dan 55.000 perempuan) di mana 80.000 diantaranya berusia antara dan kurang dari 15 tahun.

Berdasarkan aspek-aspek diatas UNDP telah menetapkan standar pengukuran pembangunan sumber daya manusia yang dituangkan kedalam Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2009, menurut laporan dari UNDP dalam Human Development Report (HDR) Indonesia menempati urutan 111 diantara 182 negara di seluruh

dunia yang disurvei. Hasil capaian tersebut tentu saja lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, antara lain: Singapura (urutan 23 ), Malaysia (urutan 66), Thailand (urutan 87), dan Philipina (urutan 105). Hal ini menunjukkan masih perlunya peningkatan pembangunan yang terfokus pada kualitas human capital atau sumber daya manusia, sehingga Indonesia bisa mengejar ketertinggalan terhadap negara-negara lainnya, khususnya di lingkup asia tenggara.

Tingginya tingkat buta aksara di Indonesia disebabkan oleh beberapa penyebab utama, yakni tingginya angka putus Sekolah Dasar (SD), beratnya kondisi geografis Indonesia, munculnya penyandang buta aksara baru, pengaruh faktor sosiologis masyarakat, Problematika Gender dalam Pendidikan.

UNESCO yang bekerja di Indonesia telah menunjukan perannya dalam memberikan bantuan dan program dalam upaya percepatan pemberantasan buta aksara. UNESCO terlibat dengan semua pihak untuk melindungi masyarakat dalam pencapaian pendidikan di Indonesia. UNESCO bekerja secara intens untuk menghentikan pertumbuhan buta aksara baru dan mendukung pembebasan mereka dari buta aksara . Semua manusia baik dewasa maupun anak- anak berhak untuk untuk mendapatkan pendidikan. Sebagaimana yang tercantum dalam tujuan kedua *Millenium Development Goals* (MDGs) Memastikan bahwa pada 2015 semua anak di manapun, laki-laki maupun perempuan, akan bisa menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh.

UNESCO yang bekerja di negara Indonesia telah menunjukkan upayanya dalam memberikan bantuan sebagai fungsinya yaitu fungsi informasi dan fungsi pembuat aturan sehingga Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan.

Langkah nyata yang terus menerus dilakukan UNESCO menunjukkan kalau lembaga ini memainkan peranan yang penting dalam mengatasi masalah buta aksara yang banyak ditemukan di Indonesia khususnya di provinsi Papua. Penghargaan yang diberikan UNESCO kepada pemerintah Indonesia ini adalah Internasional "King Sejong Literacy Prize". Upaya pemerintah dalam menuntaskan buta huruf telah menampakkan hasil yang signifikan. Di Indonesia, pada tahun 2003 tercatat ada 15.41 juta orang yang mengalami buta aksara. Namun pada tahun 2010 jumlah itu menyusut menjadi 7,54 juta orang. Artinya, Indonesia lebih cepat melampaui target Millennium Development Goals (MDGs) yang menyepakati penurunan 50 persen buta aksara pada tahun 2015. Semoga saja apa yang di usahakan lembaga ini bisa terwujud dan mencapai tujuan yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochmad Yani,. *Pengantar Hubungan Internasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional , *Laporan Perkembangan Pencapaian Millennium Development Goals Indonesia 2007*, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta. 2007.
- Bannock. G, Baxter. R. E, Davis. E. *Dictionary of Economics*. Bloomberg Press, Princeton N. J. 2003.
- Education For All Global monitoring Report. *Literacy for life*. UNESCO. 2006.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional Indonesia "Laporan Review Kebijakan: Pendidikan dan Perawatan Anak Usia Dini" Jakarta.2006.
- Kementerian Pendidikan Nasional." *Statistik Pendidikan Nasional 2008/2009*". 2009.
- Literacy: Empowerment, Development and Peace*. Ministry of Education and Culture Of Indonesian. 2012.
- PBB. United Nations Literacy Decade: Education for All ; International Plan of Action Implementation of General Assembly Resolution 56/116. New York: 2002.

## Situs Internet

*Children: education and trafficking*” dalam [http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/published\\_docs/Final-LM-Report-Bahasa-Indonesia.pdf](http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/published_docs/Final-LM-Report-Bahasa-Indonesia.pdf)

*Harmonisasi Program Pembangunan Manusia Dan Bantuan Donor Di Papua* dalam [http://www.undp.or.id/papua/docs/Booklet%20Donor%20Coordination%20June%202006%20\\_LIP%201-54\\_.pdf](http://www.undp.or.id/papua/docs/Booklet%20Donor%20Coordination%20June%202006%20_LIP%201-54_.pdf) diakses pada tanggal 05 juli 2014

*Honor and harmonization Literacy for Children*” dalam [http://www.undp.or.id/papua/docs/Booklet%20Donor%20Harmonization%20Papua\\_Bahasa/Bagian%203%20Pendidikan,%20Ekonom%20](http://www.undp.or.id/papua/docs/Booklet%20Donor%20Harmonization%20Papua_Bahasa/Bagian%203%20Pendidikan,%20Ekonom%20)

[Lokal,%20Gender.pdf](#) diakses pada tanggal 28 juni 2014.

*Literacy Initiative for `Empowerment`* dalam <http://uil.unesco.org/home/programme-areas/literacy-and-basic-skills/life-literacy-initiative-for-empowerment/news-target/literacy-initiative-for-empowerment-life/c0944fef584a58d27d1a9bef08dd0a51/> diakses tanggal 05 juli 2014

Monica dalen. “*Kata pengantar*” dalam [http://www.idpeurope.org/docs/uio\\_uipi\\_inclusion\\_book/3-Kata\\_Pengantar.pdf](http://www.idpeurope.org/docs/uio_uipi_inclusion_book/3-Kata_Pengantar.pdf) diakses pada tanggal 28 april 2014

Ratman, Dadang Rizki. 2011. *Persentase Pemuda yang Buta Aksara Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Tipe Daerah (2009)*. <http://kppo.bappenas.go.id/preview/236>. Diakses pada tanggal 01 juli 2014